



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA**

Jalan S. Siswomihardjo No. 09, Benteng, Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan Kode Pos 92812  
Telepon (0414) 21195, Faksimile (0414) 21195, Email : [bppkbkep.selayar@gmail.com](mailto:bppkbkep.selayar@gmail.com)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN  
ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
NOMOR : 100.3.3/005/I/2026/DP3AP2KB**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
TAHUN ANGGARAN 2026**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,**

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2026, maka dipandang perlu menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);  
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);  
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 Nomor 62, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 28);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah.
11. Instruksi Bupati Nomor 059/17.a/Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah yang Inklusif;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 Nomor 140);
13. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 35 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 Nomor 884).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dicantumkan pada diktum KESATU bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang dan mempunyai tugas sebagai berikut :
1. menyusun kerangka acuan kerja;
  2. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
  3. melaporkan perkembangan dan hasil pelaksanaan kegiatan
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2026;

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng  
pada tanggal 15 Januari 2026

KEPALA DINAS,



Pemerintah Kabupaten  
Kepulauan Selayar  
dokumen ini ditandatangani secara digital

Ir. H. M. YUNAN KRG TOMPO BULU, S.T., M.T., IPM.  
Pangkat/Gol. : Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 196805211998031009

Lampiran I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK  
 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
 NOMOR : 100.3./005/I/2026/DP3AP2KB  
 TENTANG  
 PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DINAS PEMBERDAYAAN  
 PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
 KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2026

SUSUNAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)  
 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
 KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
1	NUR MAYASARI, S.Pt Nip. 19801128 201001 2 006	Kasubag Program	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Rp 303.742.500</b>	PPTK
			<b>I. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>3.156.000</b>	
			Sub Kegiatan :		
			1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 818.000	
			2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 587.000	
			3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Rp 503.000	

		4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp	293.000	
		5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp	377.000	
		6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp	578.000	
		<b>II. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Rp</b>	<b>206.975.500</b>	
		Sub Kegiatan :			
		1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp	526.000	
		2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp	551.000	
		3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp	13.936.500	
		4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	191.962.000	
		<b>III. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Rp</b>	<b>93.611.000</b>	
		Sub Kegiatan :			
		1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp	41.130.000	

			2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp	46.041.000	
			3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	2.640.000	
			4 Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp	3.800.000	

KEPALA DINAS,



Ir. H. M. YUNAN KRG TOMPO BULU, S.T., M.T., IPM.

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 196805211998031009

Lampiran II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK  
 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
 NOMOR : 100.3.3/005/2026/DP3AP2KB  
 TENTANG  
 PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DINAS PEMBERDAYAAN  
 PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
 KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2026

SUSUNAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)  
 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
 KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1	Dra. SITTI NURSI AH Nip. 196908122007012036	Kasubag Umum, Kepegawaian dan Hukum	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Rp 556.607.680</b>	PPTK
			<b>I. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>3.060.000</b>	
			Sub Kegiatan :		
			1. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Rp 3.060.000	

		<b>II. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Rp</b>	<b>4.658.400</b>	
		Sub Kegiatan :			
		1. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp	4.658.400	
		<b>III. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Rp</b>	<b>548.889.280</b>	
		Sub Kegiatan :			
		1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	177.190.000	
		2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	371.699.280	

KEPALA DINAS,



Pemerintah Kabupaten  
**Kepulauan Selayar**  
dokumen ini ditandatangani secara digital

Ir. H. M. YUNAN KRG TOMPO BULU, S.T., M.T., IPM.  
Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 196805211998031009

Lampiran III : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK  
 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
 NOMOR : 100.3.3/005/I/2026/DP3AP2KB  
 TENTANG  
 PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DINAS PEMBERDAYAAN  
 PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
 KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2026

SUSUNAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)  
 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
 KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
1	ANDI HAMDANA, S.E Nip. 196904031993032010	Kasubag Keuangan	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Rp 2.820.719.120</b>	PPTK
			<b>I. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>2.820.719.120</b>	
			Sub Kegiatan :		
			1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 2.744.439.120	
			2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 75.000.000	

			3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp	800.000	
			4. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Rp	480.000	

KEPALA DINAS,



Pemerintah Kabupaten  
**Kepulauan Selayar**  
dokumen ini ditandatangani secara digital

Ir. H. M. YUNAN KRG TOMPO BULU, S.T., M.T., IPM.  
Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 196805211998031009

Lampiran IV : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK  
 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
 NOMOR : 100.3.3/005/I/2026/DP3AP2KB  
 TENTANG  
 PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DINAS PEMBERDAYAAN  
 PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA  
 BERENCANA KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2026

SUSUNAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)  
 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
 KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
1	NUR ALIM, SKM., M.Kes Nip. 197012201996031004	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b>Rp 18.300.000</b>	PPTK
			<b>I. Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Rp 18.300.000</b>	
			Sub Kegiatan :		
			1. Advokasi dan Sosialisasi Pencegahan KtP dan TPPO Kepada Pengambil Kebijakan dan Pemangku Kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 18.300.000	

			<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	<b>Rp 34.880.000</b>	
			<b>I. Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Rp 34.880.000	
			Sub Kegiatan :		
			1. Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Rp 34.880.000	

KEPALA DINAS,



Ir. H. M. YUNAN KRG TOMPO BULU, S.T., M.T., IPM.

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 196805211998031009

Lampiran V : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK  
 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
 NOMOR : 100.3.3/005/I/2026/DP3AP2KB  
 TENTANG  
 PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DINAS PEMBERDAYAAN  
 PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
 KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2026

SUSUNAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)  
 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
 KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
1	NURFACHRIANSYAH ILYAS, S.K.M, M.Kes. NIP. 19840602 201101 1 014	Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	<b>Rp 54.900.000</b>	PPTK
			<b>I. Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Rp 18.300.000</b>	
			Sub Kegiatan :		
			1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 18.300.000	
			<b>II. Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Rp 36.600.000</b>	
			Sub Kegiatan :		
			1. Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 36.600.000	

		<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	<b>Rp</b>	<b>14.860.000</b>	
		<b>III. Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam kelembagaan Data di Tingkat Daerah</b>	<b>Rp</b>	<b>14.860.000</b>	
		Sub Kegiatan :			
		1. Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Rp	14.860.000	

KEPALA DINAS,



Ir. H. M. YUNAN KRG TOMPO BULU, S.T., M.T., IPM.

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 196805211998031009

Lampiran VI : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK  
 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
 NOMOR : 100.3.3/005/I/2026/DP3AP2KB  
 TENTANG  
 PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DINAS PEMBERDAYAAN  
 PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
 KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2026

SUSUNAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)  
 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
 KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
1	MUHAMMAD TAHIR, S.IP Nip. 197407052007011050	Plt. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	<b>Rp 125.600.000</b>	PPTK
			<b>I. Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>	<b>Rp 50.000.000</b>	
			Sub Kegiatan :		
			1. Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Rp 50.000.000	

			<b>II. Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Rp 75.600.000</b>
			Sub Kegiatan :	
			1. Pencataan dan Pengumpulan Data Keluarga	Rp 75.600.000
			<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	<b>Rp 839.945.000</b>
			<b>I. Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>	<b>Rp 267.545.000</b>
			Sub Kegiatan :	
			1. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Rp 164.910.000
			2. Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)	Rp 31.416.000
			3. Advokasi Program Bangsa Kencana oleh Pokja Advokasi kepada Stakeholder dan Mitra Kerja	Rp 71.219.000
			<b>II. Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>	<b>Rp 572.400.000</b>
			Sub Kegiatan :	
			1. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Rp 572.400.000

KEPALA DINAS,



Pemerintah Kabupaten  
**Kepulauan Selayar**  
dokumen ini ditandatangani secara digital

Ir. H. M. YUNAN KRG TOMPO BULU, S.T., M.T., IPM.  
Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 196805211998031009

Lampiran VII : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK  
 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
 NOMOR : 100.3.3/005/I/2026/DP3AP2KB  
 TENTANG  
 PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DINAS PEMBERDAYAAN  
 PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA  
 BERENCANA KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2026

SUSUNAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)  
 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
 KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
1	UTAMI REZKI, S.H. NIP. 19720118 200604 2 016	Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	Rp <b>285.450.000</b>	PPTK
			<b>I. Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</b>	Rp <b>80.743.000</b>	
			Sub Kegiatan :		
			1. Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Rp 17.413.000	
			2. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Rp 63.330.000	

		<b>II. Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>	<b>Rp 204.707.000</b>
		Sub Kegiatan :	
		1. Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Rp 127.595.000
		2. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Rp 77.112.000
		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	<b>Rp 815.875.000</b>
		<b>I. Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>Rp 104.575.000</b>
		Sub Kegiatan :	
		1. Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Rp 104.575.000
		<b>II. Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>Rp 711.300.000</b>
		1. Pendampingan Keluarga Beresiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita	Rp 711.300.000

KEPALA DINAS,



Ir. H. M. YUNAN KRG TOMPO BULU, S.T., M.T., IPM.  
Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 196805211998031009